

Strategi Penanganan Konflik Melalui Operasi Pengamanan Daerah Rawan oleh Satgas Pamtas Mobile Yonif 411/Pandawa di Kabupaten Nduga Papua Pegunungan Tahun 2023-2024

Adhi Setiadi Nugroho¹ Ahmad G Dohamid² Gentio Harsono³

Strategi Pertahanan Darat, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Bogor, Jawa Barat, Indonesia^{1,2,3}

Email: nugrohadhi318@gmail.com¹ ahmaddohamid@gmail.com² hgentio@yahoo.com³

Abstrak

Konflik bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan, merupakan salah satu tantangan keamanan nasional yang kompleks karena melibatkan dimensi militer, sosial, ekonomi, dan kemanusiaan. Operasi pengamanan dilaksanakan oleh Satgas Pamtas Mobile Yonif 411/Pandawa menjadi bagian dari upaya negara dalam menjaga stabilitas keamanan serta melindungi masyarakat dari ancaman kelompok bersenjata. Pendekatan keamanan yang berorientasi pada penggunaan kekuatan militer, belum mampu menciptakan perdamaian berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi penanganan konflik yang diterapkan oleh Satgas Pamtas Mobile Yonif 411/Pandawa di Kabupaten Nduga, mengidentifikasi dampak sosial dan ekonomi yang ditimbulkan terhadap masyarakat, serta menganalisis tantangan hambatan yang dihadapi operasi pengamanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan Satgas Pamtas Mobile Yonif 411/Pandawa tidak hanya berupa pendekatan hard security (patroli, penyekatan, dan operasi pengamanan), namun dipadukan dengan pendekatan soft security (komunikasi sosial, kegiatan teritorial, pelayanan kesehatan, bantuan kemanusiaan kepada masyarakat). Strategi tersebut mampu menekan ancaman langsung dari kelompok bersenjata dan meningkatkan rasa aman masyarakat setempat. Namun, efektivitasnya masih menghadapi berbagai hambatan, diantaranya kondisi geografis yang sulit, keterbatasan logistik, dinamika sosial budaya masyarakat setempat, belum optimalnya sinergi lintas sektor dalam mendukung stabilitas jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan strategi penanganan konflik yang lebih komprehensif melalui integrasi pendekatan keamanan dan pembangunan guna mewujudkan stabilitas yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Nduga, Papua.

Kata Kunci: Satgas Pamtas, Nduga, Papua Pegunungan, Strategi Penanganan Konflik



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Kabupaten Nduga, Papua menjadi atensi nasional dan wilayah konflik tinggi akibat aktivitas kelompok separatis bersenjata, yang mengancam stabilitas keamanan, kelangsungan pembangunan, perlindungan masyarakat sipil, sehingga membutuhkan kehadiran negara, melalui TNI sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2004 dan Nomor 3 Tahun 2025 (Anugerah, 2019). Dinamika ketegangan wilayah Nduga, Papua disebabkan oleh KKB dan aparat negara. Salah satu respon pemerintah adalah Satgas Pamtas Mobile Yonif 411/Pandawa, sebagai pendekatan hanya yang berfokus pada aspek keamanan dengan pola operasi militer. Jumlah pengungsi akibat konflik bersenjata antara TNI/Polri dengan TPN-PB (Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat) di beberapa kabupaten di Papua selama periode 2018–2024, didasarkan data BBC. Lebih lanjut, sejak akhir tahun 2018, sejumlah 60.000 – 100.000 warga Papua telah mengungsi, akibat ketegangan tuntutan politik, kerusuhan dan pelanggaran HAM oleh aparat keamanan Indonesia.

Tabel 1.1 Statistik Peningkatan Kekerasan di Papua

No.	<i>Data on civil and political rights in Papua</i>	2023	2024
1	<i>Nr. of reported torture/ill-treatment cases*</i>	39	53
2	<i>Nr. of reported torture/ill-treatment victims*</i>	160+	166+
3	<i>Nr. of reported cases of extra-judicial killings</i>	17	18
4	<i>Nr. of reported victims of extra-judicial killings</i>	42	22
5	<i>Nr. of reported cases of enforced disappearances</i>	2	3
6	<i>Nr. of reported victims of enforced disappearances</i>	3	3
7	<i>Nr. of sanctions against perpetrators of police and military</i>	7	0
8	<i>Nr. of political arbitrary detentions</i>	311	396
9	<i>Nr. of peaceful demonstrations/assemblies on West Papua issues forcefully intervened by security forces*</i>	13	27
10	<i>Nr. of persons sentenced for treason & criminal conspiracy (Article 106 and/or 110 KUHP)</i>	10	4
<i>*include cases/victims of violations against indigenous Papuans and non-Papuan solidarity groups outside West Papua</i>			
<i>(+) dozens more besides the documented victims in one or more cases. Source: HRM Database, compilation from Media sources, NGOs and HRDs</i>			

Sumber: Peneliti dan Human Rights Monitor

Berdasarkan tabel diatas *Human Rights Monitor* (HRM) tahun 2023–2024, menunjukkan bahwa masih terjadi berbagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia, yang mengindikasikan situasi perlindungan hak sipil dan politik di Papua masih menjadi perhatian serius. Salah satunya, jumlah kasus penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi meningkat dari 39 menjadi 53. Selanjutnya, jumlah korban, dari 160 korban menjadi 166 korban. Hal ini menunjukkan bahwa dugaan penggunaan kekerasan dalam proses penegakan hukum dan operasi keamanan. Data menunjukkan bahwa kasus pembunuhan di luar proses hukum (*extra-judicial killings*) masih terjadi. Jumlah kasus meningkat dari 17 menjadi 18. Namun, jumlah korban menurun dari 42 menjadi 22 orang. Artinya, frekuensi kejadian tidak berkurang, namun jumlah korban dalam setiap insiden relatif lebih sedikit dibandingkan sebelumnya. Selanjutnya, kasus penghilangan paksa meningkat dari 2 menjadi 3 kasus, sedangkan jumlah korban tetap 3 orang. Lebih lanjut, akuntabilitas aparat keamanan, dari 7 sanksi terhadap pelaku dari unsur polisi atau militer (tahun 2023), sedangkan tahun 2024 tidak tercatat adanya sanksi. Kondisi ini dapat menimbulkan persepsi adanya impunitas (situasi pelaku dugaan pelanggaran tidak memperoleh pertanggungjawaban hukum atau disiplin yang memadai).

Dalam hal kebebasan sipil, jumlah penahanan sewenang-wenang yang bermuatan politik mengalami peningkatan dari 311 menjadi 396 kasus. Selain itu, jumlah aksi demonstrasi damai terkait isu Papua yang dibubarkan atau diintervensi aparat keamanan juga meningkat tajam, dari 13 aksi menjadi 27 aksi. Di sisi lain, jumlah orang yang dijatuhi hukuman atas tuduhan makar dan permufakatan jahat berdasarkan Pasal 106 dan/atau Pasal 110 KUHP, turun dari 10 menjadi 4 orang. Meskipun menurun, namun penahanan sewenang-wenang dan pembubaran demonstrasi justru meningkat. Secara garis besar, kondisi hak sipil dan politik di Papua menghadapi berbagai tantangan, yang didasarkan pada informasi dari media, organisasi non-pemerintah, dan pembela HAM. Lebih lanjut, Chairil Sadi (2020) menyatakan bahwa jika pemerintah terus melanjutkan pendekatan berbasis keamanan terhadap konflik Papua, konflik akan terus berlarut-larut dan meningkatkan jumlah korban. Selain itu, masyarakat setempat juga mengalami dampak sosial dan ekonomi akibat operasi ini, seperti perpindahan penduduk, gangguan terhadap mata pencaharian, serta terbatasnya akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Sedangkan terkait Satgas Pamtas Mobile Yonif 411/Pandawa, belum ada kajian analisis mendalam tentang efektivitas strategi manajemen konflik (termasuk keberhasilan dan tantangan).

Strategi penanganan konflik di Papua tidak hanya mengandalkan pendekatan keamanan berbasis operasi militer, tetapi harus mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan diplomasi yang lebih adaptif berbasis komunitas dengan melibatkan masyarakat lokal dalam upaya menjaga stabilitas wilayah. Keberadaan Satgas *Pamtas Mobile* memerlukan integrasi antara operasi pengamanan dan program pembangunan sehingga mampu berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Evaluasi berbasis data terhadap efektivitas strategi yang telah diterapkan juga menjadi langkah penting untuk memahami kelebihan dan kekurangan pendekatan yang digunakan, serta merumuskan perbaikan kebijakan manajemen konflik lebih komprehensif dan berkelanjutan. Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara secara total (semesta) dapat diimplementasikan di daerah konflik Papua, melalui sinergitas antar instansi dan pembinaan teritorial masyarakat lokal, yang diterapkan melalui Satgas *Pamtas Mobile* Yonif 411/Pandawa tahun 2023–2024 di wilayah Kabupaten Nduga. Satgas ini berperan sebagai kekuatan *mobile* fleksibel dan adaptif, guna menanggulangi gangguan keamanan dari kelompok separatis bersenjata. Keberhasilan satgas ini diukur dari aspek taktis militer, pengendalian situasi konflik, rasa aman masyarakat, menekan eskalasi kekerasan, serta mendukung stabilitas jangka panjang. Lebih lanjut, penugasan Satgas *Pamtas Mobile* Yonif 411/Pandawa pada tahun 2023–2024 di wilayah Kabupaten Nduga menjadi salah satu bentuk implementasi kebijakan pertahanan negara, yang sangat bergantung pada: 1) kejelasan strategi dan tujuan operasi; 2) kesiapan personel dan logistik; 3) kemampuan adaptasi terhadap medan dan budaya lokal; 4) koordinasi lintas sektor; serta 5) pendekatan komunikasi sosial maupun peran aparat teritorial dalam membina hubungan dengan masyarakat setempat.

Penelitian Terdahulu

Tabel. 1.2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis, Tahun, Judul, Publikasi	Metode Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1.	Koloay, Sondakh & Sanger (2024), <i>The Role of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in Supporting Regional Development Acceleration in Papua</i> , Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 28(1)	Kualitatif	Fokus pada peran TNI dalam pembangunan, tidak membahas operasi militer di daerah rawan konflik spesifik seperti Nduga.	Sama-sama membahas peran TNI dan perlunya pendekatan nonmiliter untuk mendukung stabilitas Papua.
2.	Sangari (2024) Analisis Kerjasama TNI dan Pemda dalam Menangani Konflik di Papua, Jurnal Pertahanan Negara, Vol. 14(1)	Kualitatif	Fokus pada hubungan kelembagaan antara TNI dan Pemda, bukan operasi satuan tugas di lapangan.	Menekankan pentingnya sinergi TNI dengan aktor lokal, relevan dengan konteks Satgas 411 di Nduga
3.	Ulayo et al. (2025) <i>Proxy War in the Papua Conflict: Geopolitical Analysis and Security Implications</i> , Jurnal Kajian Keamanan Nasional, Vol. 7(1)	Kualitatif	Membahas konflik dalam bingkai geopolitik dan strategi asimetris, tidak fokus pada strategi satuan tugas.	Memberi konteks eskalasi konflik dan urgensi adaptasi strategi keamanan seperti yang diterapkan oleh Satgas 411.
4.	Moningkey, S. M. et al. (2023) <i>Papua Conflict Resolution in Contemporary Counter-Insurgency</i> , JIRSS, Vol. 5(2)	Kualitatif	Lebih menekankan pada teori kontra-insurgensi dan <i>trust-building</i> , tidak membahas satuan atau wilayah spesifik.	Relevan dengan pendekatan resolusi konflik dan komunikasi sipil-militer yang dapat diadopsi Satgas 411
5	Eka, Prakoso & Sulistyorini (2022), <i>Optimalisasi Sinergi TNI, Polri dan K/L dalam Penanggulangan KKB di Papua</i> , JIKH, Vol. 16(2)	Kualitatif	Fokusnya pada sinergi antar lembaga nasional, bukan operasi taktis satuan mobile di daerah tertentu.	Menjadi dasar untuk evaluasi koordinasi multi-aktor yang juga menjadi tantangan Satgas di Nduga.

Sumber: diolah peneliti

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian merupakan kerangka kerja yang digunakan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam suatu studi. Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan kualitatif dengan kerangka desain fenomenologis, yang bertujuan untuk menggali secara mendalam fenomena strategi pengamanan oleh Satgas Pamtas *Mobile* Yonif 411/Pandawa dalam menghadapi konflik di Kabupaten Nduga, Papua. Menurut Creswell (2014). Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami makna yang dikonstruksikan oleh individu terhadap situasi sosial tertentu (melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi). Pendekatan fenomenologi dipilih karena fokus pada pengalaman subjektif individu dalam menghadapi realitas konflik. Dengan metode ini, peneliti dapat menangkap dinamika sosial dan keamanan yang terjadi di Nduga, tidak hanya dalam bingkai militeristik tetapi juga dalam kerangka sosial dan kemanusiaan. Desain penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif dan dilakukan dengan model studi kasus, yaitu memfokuskan analisis terhadap strategi yang diterapkan oleh Satgas Pamtas *Mobile* Yonif 411/Pandawa selama melaksanakan operasi pengamanan di Nduga tahun 2023–2024. Studi kasus dipilih untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fenomena yang kompleks dalam konteks nyata. Rancangan desain penelitian ini terdiri dari tiga tahapan utama, yakni: 1) tahapan persiapan yang terdiri atas penyusunan instrumen penelitian serta izin dan persetujuan etis pihak berwenang; 2) tahapan wawancara, observasi dan verifikasi (termasuk didalamnya penjadwalan dan pelaksanaan wawancara dengan key informasn, uji keabsahan data dengan teknik *dependability*. (Miles, Huberman & Saldana, 2014)); dan 3) Triangulasi sumber dan data dilakukan untuk memastikan akurasi dan validitas temuan melalui uji *confirmability*, memastikan bahwa hasil penelitian adalah refleksi dari data, bukan interpretasi sepihak peneliti (Maxwell, 2012).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Berdasarkan proses kondensasi, penyajian, dan verifikasi data (Miles, Huberman & Saldaña), karakteristik pelaksanaan operasi Satgas Pamtas *Mobile* Yonif 411/Pandawa di Nduga selama periode 2023–2024. *Pertama*, secara taktis Satgas menunjukkan capaian operasional yang nyata, didasarkan pada keberhasilan merebut kembali beberapa titik yang sebelumnya dikuasai KSTP, kemampuan melakukan patroli terpadu, serta pencapaian kegiatan sosial seperti pengobatan massal, pasar tumpah, dan fasilitas pembinaan teritorial yang meningkatkan tingkat interaksi dengan masyarakat lokal. Temuan ini mengindikasikan kapasitas taktis dan kemampuan koordinasi antar-unsur keamanan di lapangan. *Kedua*, pola operasi yang terungkap bersifat **reaktif** terhadap insiden banyak kegiatan pengamanan dilaksanakan sebagai respons pasca-insiden (*clear-and-hold limited*) sehingga kontrol jangka panjang atas wilayah masih terbatas. Frekuensi kontak dan serangan bertubi-tubi yang tercatat, khususnya pada sektor Paro dan Kenyam selama momen-momen politis (Pemilu 2024), menunjukkan bahwa KSTP masih mempertahankan kapasitas ofensif meski mendapat tekanan operasi. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah intelijen/strategi atau keleluasaan bergerak pelaku di medan yang sulit. *Ketiga*, kendala geografis dan logistik menjadi determinan operasional signifikan, yakni medan pegunungan, hutan lebat, dan keterbatasan jaringan jalan mendongkrak ketergantungan pada transportasi udara (helikopter), memperpanjang jalur pasokan, dan memperkecil fleksibilitas rotasi personel. Keterbatasan mobilitas ini juga mempengaruhi tempo reaksi serta cakupan kegiatan non-kinetik yang dapat dilaksanakan secara berkesinambungan, yang menguatkan bahwa “*ways*” operasional seringkali dibatasi oleh masalah “*means*”.

Keempat, intervensi sosial yang dilakukan bersifat **ad-hoc** dan temporer, pengobatan massal (470 kasus malaria ditangani), pembangunan fasilitas sementara, pasar tumpah memberi dampak penerimaan masyarakat jangka pendek tetapi belum menunjukkan keberlanjutan layanan publik (pendidikan, kesehatan) yang diharapkan untuk transformasi struktural kesejahteraan. Akibatnya, kebutuhan dasar masyarakat (kesehatan, penghidupan) tetap rentan sehingga potensi kembalinya ketegangan struktural masih terbuka. Temuan ini konsisten dengan literatur yang menekankan perluasan peran TNI ke intervensi pembangunan namun menyoroti keterbatasan kapabilitas untuk sustainabilitas program. *Kelima*, aspek sinergi antar-lembaga menjadi faktor penentu keberhasilan taktis namun belum cukup untuk menjamin stabilitas jangka panjang. Koordinasi dengan Kodim, Koramil, Polres, BIN/BAIS serta Satgas Komlek dan Kopasgat memfasilitasi operasi terpadu dan pengamanan logistik, namun kelemahan kapasitas pemerintahan daerah untuk menyelenggarakan layanan pasca-konflik dan program pemulihan ekonomi menjadi *bottleneck* bagi transisi dari stabilisasi sementara ke rekonstruksi sosial-ekonomi. Temuan ini memperlihatkan bahwa kolaborasi antar-aktor efektif pada level operasi, tetapi kurang terintegrasi pada level pembangunan dan tata kelola publik.

Strategi pengamanan yang dijalankan Satgas memiliki *imbalance* antara *Ends-Ways-Means*. Hal ini didasarkan pada tujuan strategis (menciptakan stabilitas jangka panjang dan perlindungan masyarakat) seringkali bertemu dengan cara (patroli terpadu, operasi teritorial, kegiatan sosial sementara) yang efektif secara taktis, tetapi terbentur oleh keterbatasan sarana (logistik, akses kesehatan/pendidikan, kapasitas sipil) sehingga hasil strategisnya bersifat sementara. Interpretasi ini sejalan dengan kerangka teori strategi Lykke yang menegaskan pentingnya kesesuaian antara tujuan, cara, dan sumber daya agar strategi berhasil secara berkelanjutan. Secara normatif, data menunjukkan bahwa pendekatan yang terlalu mengandalkan instrumen militeristik (kekuatan keras) tanpa dukungan berkelanjutan pada aspek human security akan sulit menyelesaikan akar konflik. Menurut perspektif keamanan manusia dan teori resolusi konflik, kebutuhan dasar masyarakat keamanan, kesehatan, penghidupan, pengakuan identitas harus menjadi bagian integral strategi agar dukungan lokal dapat dipertahankan dan radikalisme konflik diminimalkan. Hasil temuan (tingginya kasus malaria, gangguan mata pencaharian, perpindahan penduduk) menegaskan bahwa *basic needs* menjadi salah satu pendorong ketahanan konflik jangka panjang bila tidak teratasi.

Keberhasilan penerimaan masyarakat terhadap beberapa program Satgas (deklarasi dukungan NKRI, keterlibatan tokoh adat) merupakan sinyal penting bahwa ruang politik sosial untuk pendekatan non-kinetik ada dan dapat dimanfaatkan. Namun, karena intervensi sosial bersifat episodik, peluang ini belum dimanfaatkan secara strategis untuk rekonsiliasi, pembangunan kapabilitas lokal, dan restorasi layanan publik. Dengan kata lain, operasi telah membuka jendela peluang legitimasi negara, tetapi jendela itu belum dikonsolidasikan menjadi institusi pelayanan yang berkelanjutan. Adapun dimensi ancaman yang berskala asimetris dan kemungkinan pengaruh eksternal (*proxy dynamics*) yang diidentifikasi dalam literatur menambah kompleksitas: presensi ancaman yang mampu menyerang secara terkoordinasi pada momen-momen tertentu menunjukkan bahwa solusi semata-militer tidak memadai dan membutuhkan kombinasi kebijakan keamanan, intelijen, serta diplomasi lokal-regional yang lebih matang. Interpretasi ini menggarisbawahi perlunya strategi multidimensi yang menggabungkan kekuatan keras, kekuatan lunak, dan pembangunan institusional untuk mencegah siklus kekerasan berulang. Secara metodologis, analisis ini memanfaatkan triangulasi data (observasi, wawancara, dokumentasi) sehingga interpretasi berlandaskan bukti empiris lapangan. Meski demikian, keterbatasan data kuantitatif terperinci (misalnya

data statistik terkait kunjungan pasien per kegiatan, indikator ekonomi rumah tangga longitudinal) membatasi tingkat generalisasi; hal ini perlu dicatat sebagai ruang untuk penelitian lanjutan dan evaluasi program yang lebih kuantitatif.

Pembahasan

Kondisi Konflik di Kabupaten Nduga

Kabupaten Nduga menjadi salah satu episentrum wilayah konflik bersenjata di Papua Pegunungan, yang melibatkan aparat keamanan negara (TNI dan Polri), dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPN-PB). Intensitas konflik meningkat sejak peristiwa penyerangan terhadap pekerja proyek pembangunan Jalan Trans Papua pada Desember 2018 hingga meninggalnya sejumlah pekerja konstruksi (IPAC, 2018). Menurut Widjojo dkk. (2009), konflik Papua merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang meliputi perbedaan persepsi terhadap integrasi Papua ke dalam NKRI, ketimpangan pembangunan, marginalisasi masyarakat asli Papua, serta pendekatan keamanan yang selama bertahun-tahun menjadi instrumen utama dalam pengelolaan konflik, yang menyebabkan konflik di Kabupaten Nduga, menjadi konflik multidimensional. Secara empiris, kondisi konflik di Kabupaten Nduga tahun 2023–2024, masih ditandai kontak senjata antara aparat keamanan dengan KKB di beberapa distrik. Situasi keamanan yang belum sepenuhnya kondusif menyebabkan terganggunya aktivitas masyarakat, seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, mobilitas penduduk, hingga aktivitas ekonomi masyarakat, termasuk distribusi logistik maupun pelayanan pemerintahan (BPS Kabupaten Nduga, 2024).

Dampak konflik terlihat dari tingginya angka pengungsian masyarakat sipil, sepanjang periode 2018–2024 sebanyak 56.981 jiwa masyarakat Nduga terpaksa mengungsi ke lokasi yang lebih aman. Kondisi ini menunjukkan bahwa konflik di Kabupaten Nduga telah menjadi persoalan kemanusiaan berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat sipil (LBH Papua, 2024). Selain pengungsian, masih terdapat dugaan pelanggaran hak asasi manusia dalam konteks konflik Papua. *Human Rights Monitor* (2025) mencatat bahwa tahun 2024 terjadi peningkatan pelanggaran hak sipil dan politik di Papua, seperti kasus penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, serta pembubaran demonstrasi damai. Dari perspektif keamanan nasional, konflik di Kabupaten Nduga dikategorikan sebagai konflik internal yang mengancam terhadap stabilitas keamanan negara, yang ditandai penggunaan kekerasan terorganisasi antara aktor negara dengan aktor non-negara dengan tujuan politik tertentu (Ramsbotham, Woodhouse, dan Miall. 2016), sehingga dalam penanganan konflik memerlukan strategi yang mengintegrasikan aspek keamanan, sosial, politik, dan kemanusiaan.

Faktor-Faktor Penyebab Konflik dan Dampak Sosial-Ekonomi

Secara umum, faktor-faktor penyebab konflik di Kabupaten nduga berasal dari berbagai aspek, diantaranya: historis, politik, sosial, ekonomi, dan geografis. Salah satu faktor utama konflik adalah perbedaan pandangan politik mengenai integrasi Papua ke dalam NKRI. Lebih lanjut, sebagian kelompok memandang proses integrasi melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 menyisakan persoalan historis yang belum terselesaikan, sehingga melahirkan tuntutan politik tertentu dengan berbagai bentuk perlawanan, seperti perlawanan bersenjata oleh TPN-PB. Sedangkan, pemerintah memandang Papua sebagai bagian sah dari NKRI, dan menilai segala bentuk gerakan separatis adalah ancaman terhadap kedaulatan negara (Widjojo dkk., 2009). Selain faktor politik, ketimpangan pembangunan dan keterbatasan akses pelayanan publik juga menjadi faktor yang memperkuat konflik. Keterisolasian wilayah menimbulkan kesenjangan pembangunan dibandingkan daerah lain

memunculkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap negara (BPS Kabupaten Nduga, 2024). Pendekatan keamanan yang cenderung dominan dalam penanganan konflik Papua, melalui operasi keamanan, yang dinilai belum sepenuhnya mampu menyentuh akar persoalan konflik. Menurut *International Crisis Group* (2020), penggunaan pendekatan keamanan yang tidak diimbangi dengan dialog, pembangunan inklusif, dan perlindungan hak-hak masyarakat sipil berpotensi memperpanjang siklus kekerasan dan ketidakpercayaan masyarakat kepada negara.

Kondisi geografis Kabupaten Nduga juga menjadi faktor sulitnya penanganan konflik, dan menjangkau daerah-daerah rawan serta mendistribusikan bantuan kepada masyarakat terdampak konflik (BPS Kabupaten Nduga, 2024). Konflik berkepanjangan menimbulkan berbagai dampak sosial bagi masyarakat Kabupaten Nduga, dalam periode 2018–2024 terdapat sekitar 56.981 jiwa mengungsi akibat konflik bersenjata, sehingga masyarakat kehilangan tempat tinggal, terpisah dari anggota keluarga, serta keterbatasan berbagai akses kehidupan (LBH Papua, 2024). Misalnya, dari sisi pendidikan, proses belajar mengajar terganggu. Pada kondisi kesehatan, keterbatasan akses fasilitas kesehatan dan pelayanan kesehatan tidak dapat berjalan secara maksimal. Aspek ekonomi, terganggunya aktivitas produksi, distribusi, dan masyarakat tidak dapat mengelola lahan pertanian secara optimal, daya beli masyarakat menurun, sehingga tingkat kerentanan ekonomi menjadi semakin tinggi (BPS Kabupaten Nduga, 2024). Pada hubungan sosial masyarakat, menyebabkan rasa takut, trauma, dan ketidakpastian, serta mempengaruhi kohesi sosial masyarakat, maupun kepercayaan masyarakat terhadap negara. Menurut Burton (1990), konflik yang tidak ditangani secara menyeluruh dapat menyebabkan kebutuhan dasar manusia, seperti rasa aman, identitas, dan pengakuan, tidak terpenuhi sehingga berpotensi memunculkan konflik baru di masa mendatang.

Strategi Penanganan Konflik yang Diterapkan oleh Satgas Pamtas *Mobile* Yonif 411/Pandawa dalam Menghadapi Dinamika Konflik Bersenjata di Kabupaten Nduga

Pendekatan utama yang digunakan adalah analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*), sehingga dapat dipetakan sebagai berikut: 1) kekuatan satuan dalam hal kemampuan tempur, mobilitas, dan adaptasi terhadap medan; 2) kelemahan yang muncul selama operasi; 3) peluang kerja sama lintas aktor; serta 4) ancaman dari dinamika konflik bersenjata dan geografis wilayah. Selain itu, kerangka analisis strategi berdasarkan Model Lykke (keterkaitan tujuan (*ends*), cara (*ways*), dan alat (*means*)).

Strategi Arthur Lykke

Optimalisasi pengelolaan konflik Satgas Pamtas *Mobile* Yonif 411/Pandawa terdiri atas tiga komponen utama, yaitu *Ends* (tujuan), *Ways* (cara), dan *Means* (sarana atau sumber daya), yang harus seimbang, sehingga strategi dapat diimplementasikan secara efektif, dan tujuan tercapai secara optimal. Contohnya, elemen *Ends* adalah terciptanya kondisi keamanan yang stabil, dengan menggunakan *Ways* yang tepat melalui pendekatan kombinatif (operasi tempur terbatas, patroli ambush, penguasaan titik kuat strategis, serta pembinaan teritorial dan komunikasi sosial sebagai upaya membangun kepercayaan masyarakat lokal). Sedangkan, unsur *Means* mencakup segala sumber daya yang mendukung implementasi strategi, salah satunya adalah dukungan Satgas Yonif 411/Pandawa terdiri atas 450 personel yang tersebar di 10 titik kuat dengan berbagai strategi mobilisasi. Penggunaan strategi ini dapat menilai pencapaian pengelolaan konflik telah berjalan optimal atau tidak, serta memudahkan dalam evaluasi. Secara garis besar, *Ends* (Tujuan) operasi ini adalah menciptakan stabilitas keamanan di Kabupaten Nduga serta mendukung keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keamanan wilayah Nduga dari ancaman Kelompok Separatis Teroris Papua (KSTP), Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogoya.
2. Memulihkan stabilitas keamanan.
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.

Selanjutnya, *Ways* (Cara) dari Satgas Pamtas *Mobile* Yonif 411/Pandawa adalah gabungan operasi tempur terbatas dan operasi teritorial, bersifat kombinatif dan adaptif, yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Operasi Tempur Terbatas dan *Mobile Combat* (patroli rutin dan penghadangan terhadap pergerakan KSTP di daerah rawan seperti wilayah Kenyam, Alguru, Batas Batu, dan sekitarnya. Strategi "*search and sweep*" dilakukan secara berpindah (*mobile*) guna memperkecil ruang manuver musuh dan meningkatkan daya gentar.
2. Penguasaan Titik Kuat dan Pos Strategis, dengan menempatkan 10 titik kuat (6 di Nduga, 2 di Asmat, 2 di Jayapura dan Timika) sebagai basis komando pengendali operasi dan pos pengamanan terpadu.
3. Pendekatan Teritorial dan Humanistik, melalui komunikasi sosial, pengobatan massal, pemberian bantuan bahan makanan, pembangunan gereja, serta anjungsana ke rumah tokoh adat/agama.
4. Mediasi Konflik Horizontal, yakni upaya meredam konflik antarsuku, menyelesaikan sengketa yang berpotensi memicu kekerasan.

Terakhir, *Means* (Sarana), meliputi personel mobilitas tinggi, pengalaman tempur satuan, perlengkapan tempur standar, serta sistem pendukung logistik dan komunikasi, yang mencakup beberapa aspek:

1. Personel dan Organisasi. Berdasarkan dokumen Laporan Purna Tugas Satgas Pamtas RI-PNG *Mobile* Yonif 411/Pandawa/6/2 Kostrad, jumlah total personel Satgas adalah 450 orang, di bawah pimpinan Letkol Inf Subandi, S.E., M.I.P., yang tersebar di beberapa Titik Kuat, salah satunya di Kabupaten Nduga sebanyak 375 personel.
2. Logistik dan Peralatan. Berdasarkan dokumen Laporan Purna Tugas Satgas Pamtas *Mobile* Yonif 411/Pandawa, beberapa logistik dan peralatan yang mendukung pelaksanaan tugas operasi Satgas adalah a) Senjata dan Operasional (Senapan SS2 kaliber 5,56 mm, Amunisi kaliber 5,56 mm SS2 link., helikopter dan lain-lain); b) Logistik dan Konsumsi (Ransum tempur Bekal makanan pokok dan sebagainya); c) Kesehatan dan Medis (obat-obatan, vitamin, evakuasi berkala dan lain-lain); d) Peralatan Pendukung Pembinaan Teritorial (perlengkapan sekolah, pakaian layak pakai, dukungan sosialisasi bahasa lokal Nduga) untuk mendukung komunikasi Satgas dengan warga sekitar.
3. Dukungan Wilayah dan Kelembagaan. Koordinasi lintas sektor belum optimal, terutama daerah-daerah dengan separatisme yang kuat. Beberapa diantaranya: a) Dukungan Wilayah (Forkopimda Kabupaten Nduga, Pj Bupati Nduga (Drs. Edison Gwijangge), Kodim dan Koramil Kenyam, Polres Nduga); b) Dukungan TNI-POLRI (Satgas Damai Cartenz (Polri); Satgas Kopasgat, Satgas BIN, BAIS, Mandala III, Taipur, Satgas Amanusa dan Komlek)

Berdasarkan hasil analisis terhadap penerapan optimalisasi pengelolaan konflik oleh Satgas Pamtas *Mobile* Yonif 411/Pandawa di Kabupaten Nduga, dapat disimpulkan bahwa satuan telah menerapkan pendekatan strategi yang cukup komprehensif, dengan memadukan unsur *Ends*, *Ways*, dan *Means* secara terukur. Artinya, upaya serius mengadaptasikan teori strategi militer modern ke dalam kondisi konflik domestik yang kompleks dan

multidimensional. Hal ini didasarkan pada tujuan operasi jelas (menstabilkan wilayah Nduga dari ancaman kelompok separatis bersenjata dan mendukung pemerintahan daerah, dengan menggabungkan operasi tempur terbatas dan kegiatan teritorial humanistik, melalui keunggulan satuan, titik kuat, serta sinergi dengan unsur kewilayahan dan kelembagaan lain). Teori Pertahanan Negara Ken Booth tercermin dalam pendekatan Satgas yang tidak hanya berfokus pada ancaman fisik, namun pada aspek sosial, budaya, dan psikologis masyarakat setempat. Lebih lanjut, Teori Resolusi Konflik John Burton, terlihat dari keterlibatan Satgas dalam kegiatan seperti penyelesaian konflik antarsuku, penyediaan akses kesehatan, pemberdayaan ekonomi lokal melalui pasar tumpah, dan pembangunan sarana ibadah, sehingga mampu menekan kekerasan, membangun landasan sosial perdamaian jangka panjang. Namun, lemahnya kesinambungan program dan belum optimalnya pendekatan lintas budaya menjadi tantangan dalam pelaksanaan Satgas Pamtas *Mobile* Yonif 411/Pandawa di Kabupaten Nduga. Artinya, strategi yang diterapkan Satgas Pamtas *Mobile* 411 di Nduga memerlukan penyempurnaan dalam dimensi implementasi, keberlanjutan, dukungan kebijakan terarah, integrasi sipil-militer, dan pelibatan aktor-aktor non-negara dalam mendukung stabilitas Papua.

Pendekatan "*ways*" dan "*means*" dalam operasi Satgas Pamtas 411 mengintegrasikan metode militer dan sipil secara sinergis, yang menghubungkan tujuan, sumber daya, dan langkah taktis. Misalnya sumber daya yang berasal dari personel militer terlatih maupun tokoh adat dan pemerintahan yang ada dikampung-kampung untuk menjalankan berbagai *ways* berupa patroli terpadu, bakti sosial, dan komunikasi sosial. Sinergi antar lembaga keamanan dan pemerintahan juga krusial dalam menjaga ketahanan wilayah. Ketahanan wilayah dan pendekatan militer-sipil muncul sebagai elemen kunci lain dalam analisis strategis yang menekankan pentingnya membangun basis dukungan masyarakat untuk menjaga stabilitas wilayah perbatasan. Dalam praktiknya, Satgas Pamtas 411 rutin melaksanakan serbuan teritorial berupa bakti TNI (perbaikan infrastruktur, sekolah, atau fasilitas ibadah) dan pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, ekonomi) sebagai bentuk integrasi tugas militer-sipil. Kegiatan teritorial oleh Yonif 411 di Nduga dapat dimaknai memperkuat ketahanan wilayah setempat melalui program-program pembinaan kemandirian masyarakat, membangun infrastruktur, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap aparat keamanan. Hal ini membuktikan bahwa keberhasilan yang berkelanjutan memerlukan koordinasi komprehensif, yang berasal dari TNI, Polri, BIN, Kementerian terkait, dan pemerintah daerah, yang mempertimbangkan kondisi sosial-budaya lokal, dengan menggunakan pendekatan inklusif dan multispesialis. Kombinasi *ends-ways-means* yang seimbang, disertai kemandunggalan TNI-rakyat dan sinergi antara aparat keamanan dan pemangku kepentingan sipil adalah kunci keberhasilan stabilisasi dan pembinaan wilayah perbatasan di Papua.

Dinamika operasi Satgas Pamtas *Mobile* Yonif 411/Pandawa di Nduga memperlihatkan kompleksitas hubungan antara tujuan strategis, kemampuan operasional, dan kondisi sosial-politik lokal, juga berkaitan dengan perbedaan pandangan waktu antar-aktor. Pemerintah pusat dan aparat keamanan memandang stabilitas jangka pendek hingga menengah, yang berfokus pada pemulihan keamanan dan akses; sementara masyarakat setempat memerlukan jaminan layanan dasar dan perbaikan kehidupan ekonomi jangka panjang. Artinya, strategi keamanan di daerah konflik berskala lokal perlu dirancang dengan inter-temporalitas yang eksplisit menghubungkan kegiatan operasi keamanan darurat dengan rencana pembangunan jangka menengah dan panjang yang konkret (perencanaan yang menjembatani "stabilisasi" dengan "rekonstruksi") (Miles et al.; Lykke). Upaya militer-sipil yang episodik (kegiatan bakti sosial, pengobatan massal, perbaikan fasilitas sementara) menghasilkan dividen politik

(kepercayaan jangka pendek terhadap aparat keamanan), namun dividen tersebut rentan hilang tanpa adanya institusi pelayanan publik yang mampu mengambil alih fungsi tersebut secara berkelanjutan, sesuai dengan konsep legitimasi negara yang dibangun melalui interaksi sosial haruslah diikuti oleh kapasitas birokrasi lokal untuk merespons kebutuhan warga. Oleh karena itu, diskursus tentang keberlanjutan program perlu menempatkan lembaga pemerintahan daerah sebagai aktor sentral dalam rencana pasca-konflik, termasuk penguatan kapasitas aparatur pemerintahan, alokasi anggaran berkelanjutan, dan mekanisme akuntabilitas publik. Rekomendasi kebijakan harus menekankan alokasi anggaran terpadu (*cross-sectoral budget*) dan *roadmap* pengalihan tanggung jawab dari Satgas Pamtas *Mobile 411 Nduga* ke pemerintahan sipil secara bertahap.

Aspek sosio-kultural juga memainkan peran determinan dalam efektivitas operasi. Misalnya pengakuan terhadap struktur adat, bahasa lokal, dan mekanisme penyelesaian konflik tradisional adalah kunci untuk membuka kanal komunikasi yang efektif. Program pembinaan harus mengintegrasikan pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh adat, gereja (atau pemuka agama setempat), dan organisasi masyarakat sipil lokal dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Dari sisi intelijen dan operasi informasi, perlunya pendalaman intelijen berbasis masyarakat (*human intelligence*) yang lebih sistematis. Penguatan mekanisme intelijen harus mencakup peningkatan kapasitas analitik untuk memahami motif, struktur, dan jalur pendanaan kelompok bersenjata, serta pengembangan unit intelijen budaya yang mampu membaca dinamika lokal. Selanjutnya, komunikasi publik (*information operations*) perlu diarahkan untuk membendung narasi provokasi kekerasan, dan menyebarluaskan capaian positif program pembangunan dan perlindungan. Logistik dan *sustainability* operasi juga menonjol sebagai kendala struktural. Ketergantungan pada transportasi udara dan rantai logistik panjang meningkatkan biaya operasi serta mengurangi tempo respon. Solusi teknis jangka menengah harus mencakup pembangunan infrastruktur, misalnya perbaikan jalan kabupaten, peningkatan fasilitas kesehatan dasar, dan titik pasokan logistik terpadu di lokasi strategis, yang juga memprioritaskan proyek dengan menyerap tenaga kerja lokal, kontraktor setempat, dan menghindari dampak sosial negatif seperti alih fungsi lahan tanpa kompensasi, melalui sinergitas antar kementerian (PUPR, Kemenkes, Kemendagri). Pendekatan keamanan manusia (*human security*) menawarkan lensa analitis yang relevan: keamanan diukur bukan hanya dari ketiadaan ancaman bersenjata, tetapi dari kemampuan warga memperoleh penghidupan, layanan kesehatan, pendidikan, dan kebebasan dari ketakutan.

Integrasi program-program pemberdayaan ekonomi (pelatihan keterampilan, dukungan usaha mikro) dan pemenuhan layanan dasar merupakan upaya preventif yang efektif dalam jangka menengah untuk mereduksi basis dukungan bagi gerakan bersenjata, yang harus dirancang dengan indikator kinerja yang jelas (penurunan angka kemiskinan lokal, peningkatan akses sekolah dasar, atau jumlah usaha mikro dengan kenaikan kelas dalam 12–24 bulan), guna menunjukkan dampak nyata dari strategi multi-sektoral. Permasalahan hukum dan etika, operasi di daerah dengan populasi sipil rentan menuntut kepatuhan ketat terhadap hukum humaniter, perlindungan HAM, dan *standard operating procedures (SOP)* yang mengedepankan keselamatan sipil. Kejadian-kejadian yang melibatkan korban sipil, memiliki potensi merusak legitimasi negara secara signifikan. Oleh karena itu, mekanisme pengaduan yang independen dan prosedur investigasi insiden harus tersedia dan diimplementasikan dengan transparansi. Pelatihan hak asasi manusia dan *rules of engagement (ROE)* bagi prajurit perlu ditingkatkan, sekaligus membangun mekanisme remedial dan kompensasi cepat apabila pelanggaran terjadi langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan jangka panjang.

Dari perspektif kebijakan, beberapa rekomendasi operasional konkret dapat diajukan. *Pertama*, desain program stabilisasi harus memprioritaskan transisi cepat dari operasi keamanan ke program pembangunan terpadu dengan matriks tanggung jawab dan alokasi sumber daya (*who does what*) yang jelas antara TNI, Pemda, Kementerian terkait, dan donor/NGO. *Kedua*, diperlukan roadmap pengalihan peran (*drawdown plan*) yang menjabarkan indikator kebutuhan objektif untuk pengalihan fungsi kepada aparat sipil (tingkat insiden, kapasitas layanan kesehatan, indikator ekonomi minimum). *Ketiga*, penguatan kelembagaan intelijen budaya dan *analytic fusion center* di tingkat regional dapat meningkatkan kualitas intelijen strategis. *Keempat*, program pemberdayaan ekonomi harus memadukan pendekatan *top-down* (proyek infrastruktur) dan *bottom-up* (*microfinance*, pelatihan kewirausahaan) agar manfaatnya bersifat inklusif dan mengikat komunitas pada jalur perdamaian. Untuk memastikan akuntabilitas dan efektivitas, kerangka *monitoring and evaluation* (M&E) diperlukan. Rencana M&E harus mencakup indikator *output*, *outcome*, dan *impact* yang terukur; data *baseline* harus dikumpulkan sebelum program besar dilaksanakan agar evaluasi kuantitatif dapat dilakukan. Indikator contoh: jumlah kunjungan layanan kesehatan per bulan (*output*), perubahan persepsi rasa aman masyarakat (%) (*outcome*), dan penurunan insiden kekerasan terukur per triwulan (*impact*). Penggunaan *mixed-methods evaluation* (kombinasi kuantitatif dan kualitatif) direkomendasikan untuk menangkap dinamika yang tidak mudah diukur, seperti perubahan tingkat kepercayaan dan relasi antar-komunitas. Pelibatan akademisi lokal dan lembaga penelitian akan memperkuat kredibilitas evaluasi dan membantu transfer pengetahuan ke kebijakan publik.

Beberapa keterbatasan penting yang harus diakui. *Pertama*, ketersediaan data jangka panjang masih terbatas; banyak indikator sosio-ekonomi dan kesehatan belum memiliki *time-series* yang memadai, sehingga inferensi harus dibuat secara hati-hati. *Kedua*, dinamika konflik bersifat non-linear dan dipengaruhi variabel eksternal (pergerakan kelompok bersenjata lintas-wilayah, dinamika pasar gelap, atau perubahan politik nasional) yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi. *Ketiga*, intervensi yang dirancang oleh aktor luar (TNI/pusat) harus berhati-hati terhadap efek substitusi di mana campur tangan eksternal menggeser peran aktor lokal dan berpotensi menimbulkan ketergantungan. Keterbatasan-keterbatasan ini menuntut pola intervensi adaptif dan evaluatif yang fleksibel, serta kesiapan untuk merevisi strategi berbasis bukti lapangan.

Keberhasilan operasi stabilisasi di wilayah perbatasan bergantung pada keseimbangan antara pendekatan keamanan tradisional dan pembangunan manusia, yang menitikberatkan kebutuhan integrasi multidimensi lebih kuat menghubungkan teori strategi (*ends-ways-means*) dengan teori keamanan manusia dan pembangunan. Hal ini membuka ruang pengembangan model analitis baru menggunakan variabel-variabel institusional (kapasitas pemerintahan daerah), kultural (legitimasi adat), dan ekonomi (ketahanan penghidupan) sebagai faktor determinan keberhasilan strategi stabilisasi. Pembahasan strategis terhadap operasi Satgas Pantas *Mobile Yonif 411/Pandawa* di Nduga tahun 2023–2024 menunjukkan bahwa dinamika konflik di Papua tidak dapat dipahami semata-mata sebagai persoalan keamanan konvensional, melainkan sebagai konflik multidimensional yang melibatkan aspek militer, sosial, ekonomi, politik, dan kultural. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya keseimbangan antara tujuan (*ends*), cara bertindak (*ways*), dan sarana (*means*) (Lykke. 2010). Ketika keseimbangan tersebut tidak tercapai, maka keberhasilan operasi hanya bersifat taktis dan jangka pendek, tanpa mampu menghasilkan stabilitas strategis yang berkelanjutan.

Operasi pengamanan yang dilakukan Satgas Yonif 411 terbukti efektif dalam menekan ancaman langsung dari kelompok separatis bersenjata melalui patroli terpadu, penguasaan wilayah strategis, serta respons cepat terhadap gangguan keamanan. Namun, efektivitas

tersebut masih bersifat reaktif dan temporer, karena belum sepenuhnya diintegrasikan dengan mekanisme pembangunan sipil yang berkelanjutan. Strategi militer tidak boleh berhenti pada pencapaian kemenangan taktis, melainkan harus diarahkan pada penciptaan kondisi politik dan sosial yang mendukung perdamaian jangka panjang (Bartholomees. 2012). Pendekatan keamanan yang terlalu menitikberatkan pada penggunaan kekuatan keras (**hard power**) berisiko mengabaikan akar konflik yang bersifat struktural, seperti keteringgalan pembangunan, keterbatasan akses layanan publik, dan rendahnya kesejahteraan masyarakat Papua, khususnya di Kabupaten Nduga. Booth (2007) menegaskan bahwa keamanan sejati diukur dari absennya kekerasan, terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, termasuk rasa aman, kesehatan, pendidikan, dan penghidupan yang layak. Artinya, kasus penyakit endemik yang tinggi, keterbatasan fasilitas kesehatan, serta gangguan aktivitas ekonomi masyarakat Kabupaten Nduga menguatkan relevansi pendekatan keamanan manusia dalam merancang strategi stabilisasi wilayah.

Strategi yang diterapkan oleh Satgas Pamtas *Mobile* Yonif 411/Pandawa menunjukkan adanya kombinasi *hard approach* (patroli keamanan, penguasaan wilayah, dan tindakan terhadap ancaman bersenjata) dan *soft approach* (komunikasi sosial, kegiatan teritorial, bantuan kemanusiaan, dan upaya membangun kepercayaan masyarakat). Hal ini dikarenakan konflik di Kabupaten Nduga tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan, tetapi juga menyangkut dimensi sosial dan kemanusiaan yang lebih luas (Ramses & Tull, 2018). Strategi penanganan konflik oleh Satgas Pamtas *Mobile* Yonif 411/Pandawa di Kabupaten Nduga selama periode 2023–2024 tidak terbatas pada tindakan pengamanan bersenjata semata, namun mencakup penguasaan wilayah, pembinaan teritorial, kegiatan kemanusiaan, penguatan koordinasi lintas sektor, adaptasi terhadap kondisi geografis, serta perlindungan masyarakat sipil. Pendekatan yang menggabungkan aspek keamanan dan kemanusiaan tersebut diharapkan mampu menciptakan stabilitas keamanan sekaligus mendukung terwujudnya kondisi masyarakat yang lebih kondusif di Kabupaten Nduga.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan menggunakan metodologi studi kasus kualitatif, yang melibatkan wawancara, pengamatan, dan analisis dokumen kesimpulan dari studi ini adalah sebagai berikut:

1. Kondisi konflik di Kabupaten Nduga tahun 2023–2024 masih berada pada tingkat kerawanan yang tinggi. Konflik yang terjadi merupakan bagian dari konflik nasional yang melibatkan aparat keamanan negara dengan kelompok bersenjata, sehingga memiliki dimensi keamanan, politik, sosial, dan kemanusiaan. Tingginya intensitas kontak senjata, jumlah pengungsi, terganggunya aktivitas pemerintahan, serta terbatasnya akses pelayanan dasar menunjukkan bahwa konflik di Nduga merupakan permasalahan yang kompleks dan multidimensional.
2. Konflik di Kabupaten Nduga dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi persoalan historis dan politik Papua, ketimpangan pembangunan, keterbatasan akses pelayanan publik akibat kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta dominannya pendekatan keamanan dalam pengelolaan konflik. Penanganan konflik juga menghadapi berbagai kendala operasional, seperti medan yang berat, minimnya infrastruktur pendukung, keterbatasan sarana transportasi, dan kemampuan adaptasi kelompok bersenjata terhadap kondisi wilayah.
3. Konflik yang berlangsung secara berkepanjangan menimbulkan dampak sosial dan ekonomi yang signifikan bagi masyarakat Kabupaten Nduga. Dampak tersebut antara lain meningkatnya jumlah pengungsi, terganggunya proses pendidikan dan pelayanan

- kesehatan, menurunnya aktivitas ekonomi masyarakat, serta munculnya trauma dan rasa tidak aman dalam kehidupan sehari-hari.
4. Satgas Pamtas Mobile Yonif 411/Pandawa telah menerapkan strategi penanganan konflik yang mengombinasikan pendekatan keamanan dan pendekatan teritorial. Berdasarkan teori strategi Arthur F. Lykke Jr., strategi yang diterapkan telah mencerminkan keterpaduan antara unsur *ends*, *ways*, dan *means*. Unsur *ends* diwujudkan melalui tujuan menciptakan stabilitas keamanan, melindungi masyarakat, serta mendukung keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Nduga.
 5. Unsur *ways* dalam strategi penanganan konflik diwujudkan melalui berbagai metode pelaksanaan. Metode tersebut meliputi patroli keamanan, penguasaan wilayah rawan, pembinaan teritorial melalui komunikasi sosial dengan masyarakat, pelaksanaan kegiatan kemanusiaan, serta penguatan koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendukung efektivitas operasi.
 6. Unsur *means* didukung oleh kesiapan sumber daya yang dimiliki Satgas Pamtas Mobile Yonif 411/Pandawa. Dukungan tersebut mencakup kualitas dan pengalaman personel, perlengkapan dan logistik operasi, serta kemampuan adaptasi terhadap karakteristik medan pegunungan Papua. Keseimbangan antara tujuan, cara, dan sarana menunjukkan bahwa strategi yang diterapkan telah diarahkan untuk mewujudkan stabilitas keamanan sekaligus memperhatikan aspek perlindungan masyarakat.
 7. Efektivitas penanganan konflik di Kabupaten Nduga tidak hanya bergantung pada operasi keamanan, tetapi juga pada sinergi lintas sektor dan pendekatan yang humanis. Oleh karena itu, penyelesaian konflik secara berkelanjutan memerlukan kerja sama antara aparat keamanan, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan masyarakat dalam menjawab akar permasalahan konflik guna mewujudkan perdamaian yang lebih stabil dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amer, R., Swain, A., & Öjendal, J. (Eds.). (2012). *The Security–Development Nexus: Peace, Conflict and Development*. London: Anthem Press.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Nduga. (2024). *Kabupaten Nduga dalam Angka 2024*. Kenyam: BPS Kabupaten Nduga.
- Bappenas. (2022). *Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas.
- Bartholomees Jr., J. B. (2012). *Theory of War and Strategy*. Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College Press.
- Booth, K. (2005). *Theory of World Security*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Burton, J. (1990). *Conflict: Resolution and Prevention*. New York: St. Martin's Press.
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxford: Oxford University Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Damara, T. (2021). Efektivitas Satgas Mobile dalam Operasi Keamanan Wilayah. *Jurnal Militer dan Pertahanan Negara*, 3(2), 21–35.
- Eka, R. I., Prakoso, B. H., & Sulistyorini, D. (2022). Optimalisasi Sinergisitas TNI, Polri dan K/L dalam Penanggulangan Kelompok Teroris Papua dalam Rangka Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 16(2), 267–284.
- Heuser, B. (2010). *The Evolution of Strategy: Thinking War from Antiquity to the Present*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Human Rights Monitor. (2025). *Annual Report 2024: Human Rights Developments in West Papua*. Papua Human Rights Center.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2016). *Professional Standards for Protection Work Carried Out by Humanitarian and Human Rights Actors in Armed Conflict and Other Situations of Violence*. Geneva: ICRC.
- International Committee of the Red Cross (ICRC). (2020). *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed Conflicts*. Geneva: ICRC.
- International Crisis Group. (2020). *Indonesia: Escalating Tensions in Papua*. Brussels: International Crisis Group.
- IPAC (Institute for Policy Analysis of Conflict). (2018). *After the Nduga Killings: Investigating the Workers' Deaths and the Conflict in Papua*. Jakarta: Institute for Policy Analysis of Conflict.
- Kepala Staf Angkatan Darat. (2009). *Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Perkasad/21/XI/2009 tentang Pembinaan Teritorial*. Jakarta: Mabes TNI AD.
- Koloay, J. S., Sondakh, J. J., & Sanger, E. P. (2024). The Role of the Indonesian National Armed Forces (TNI) in Supporting Regional Development Acceleration in Papua. *Journal of Defense Resources Management*, 15(1), 33–47.
- Kurnianto, T. A., Santoso, P., & Utama, A. P. (2022). Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi Humanistik. *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, 12(1), 75–88.
- LBH Papua. (2024). *Data Pengungsian Akibat Konflik Bersenjata di Tanah Papua Tahun 2018–2024*. Jayapura: Lembaga Bantuan Hukum Papua.
- Lykke, A. F. Jr. (1989). *Defining Military Strategy: Ends, Ways, Means*. Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Los Angeles: Sage Publications.
- Moningkey, S. M., Sumolang, D. F., & Rumampuk, L. M. (2023). Papua Conflict Resolution in Contemporary Counter-Insurgency Perspective Using Mystic Diamond. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*, 13(2), 201–220.
- Nasution, A. H. (2019). *Pokok-Pokok Gerilya dan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- OECD. (2012). *Evaluating Peacebuilding Activities in Settings of Conflict and Fragility*. Paris: OECD Publishing.
- Patton, M. Q. (2008). *Utilization-Focused Evaluation* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Prasetyo, D. P., & Handayani, E. (2023). Strategi Komunikasi Sosial TNI AD di Wilayah Rawan Konflik. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 11(3), 155–168.
- Purnomo, D. (2017). *Manajemen Konflik: Pendekatan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Gava Media.
- Ramsbotham, O., Woodhouse, T., & Miall, H. (2016). *Contemporary Conflict Resolution* (4th ed.). Cambridge: Polity Press.
- Republik Indonesia (2019). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Nduga di Provinsi Papua*. Jakarta.



- Republik Indonesia. (2020). *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat*. Jakarta.
- Rizky, A. F. (2021). Pendekatan Human Security dalam Penyelesaian Konflik di Papua. *Jurnal Global Strategis*, 15(2), 92–104.
- Sadi, C. (2020). Dinamika Konflik dan Upaya Resolusi di Papua. *Jurnal Kajian Keamanan Nasional*, 6(1), 43–49.
- Sangari, R. A. Y. (2024). Analisis Kerja Sama TNI dan Pemerintah Daerah dalam Menangani Konflik di Papua. *Jurnal Strategi Pertahanan*, 9(1), 77–95.
- Smith, R. (2006). *The Utility of Force: The Art of War in the Modern World*. London: Penguin Books.
- Suparman, S. (2020). *Strategi Pertahanan Negara dalam Perspektif Keamanan Nasional*. Jakarta: Lembaga Pustaka Strategis.
- Ulayo, M. R., Syahputra, H., & Tambunan, A. (2025). Proxy War in the Papua Conflict: Geopolitical Analysis and Security Implications. *Jurnal Kajian Keamanan Nasional*, 7(1), 55–70.
- United Nations Development Programme (UNDP). (1994). *Human Development Report 1994: New Dimensions of Human Security*. New York: Oxford University Press.
- United Nations. (2008). *United Nations Peacekeeping Operations: Principles and Guidelines*. New York: UN Department of Peacekeeping Operations.
- Walt, S. M. (1991). The Renaissance of Security Studies. *International Studies Quarterly*, 35(2), 211–239.
- Weinstein, J. M. (2007). *Inside Rebellion: The Politics of Insurgent Violence*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Widjajanto, A. (2019). Reformasi Pertahanan Indonesia dan Tantangan Keamanan Kontemporer. *Jurnal Pertahanan*, 5(3), 1–18.
- Widjojo, M. S., Al Rahab, A., Pamungkas, C., Dewi, R., & Triana, A. (2009). *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Present and Securing the Future*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Yulianto, A., & Prasetyo, D. (2021). Operasi Militer Selain Perang dan Peran TNI dalam Penanganan Konflik Internal. *Jurnal Ilmu Pertahanan*, 7(2), 89–105.